



Judul : DPR temukan kebocoran anggaran negara triliunan
Tanggal : Jumat, 04 Juli 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Hasil Kajian LKPP 2013

DPR Temukan Kebocoran Anggaran Negara Triliunan

Anggaran negara 2013 di tiap Kementerian dan Lembaga Negara terindikasi mengalami kebocoran. Angkanya sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah.

KETUA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso membeberkan, berdasarkan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2013, ditemukan banyak kebocoran anggaran negara. Kebocoran terjadi di hampir semua Kementerian dan Lembaga negara. Nilainya sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah.

"Hasil penelaahan BAKN

terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2013 yang sudah diperiksa BPK, menyimpulkan adanya kerugian Keuangan Negara yang meliputi hampir semua Kementerian dan Lembaga," kata Arjoso di Gedung DPR, Senayan, kemarin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, setidaknya ada 13 poin yang menyebabkan kebocoran keuangan negara. Di antaranya, perhitungan bagi hasil sebesar Rp 2,47

triliun. Hal ini karena perhitungan bagi hasil mengandung ketidakpastian dan adanya perbedaan pendapat antara SKK migas dan KKKK.

Selanjutnya pembayaran PPh migas tahun 2013 terdapat keterlambatan penyeteroran/pemindahbukuan penerimaan PPh migas, bonus produksi dan lain-lain dari rekening migas ke rekening kas umum negara sebesar Rp28,86 triliun.

Kebocoran lainnya adalah hasil penjualan gas tahun 2013 belum dibayarkan oleh wajib bayar kepada negara sebesar Rp 2,5 triliun. Dana belanja pensiun sebesar Rp 302,06 miliar yang sudah lebih 6 bulan tidak diambil oleh penerima pensiun, belum disetorkan kembali kepada pemerintah sehingga tidak dilaporkan dalam LKPP.

"Tahun 2013 juga masih terdapat permasalahan yang berulang kali dalam penatausahaan dan penggunaan aset tetap K/L antara lain; Aset tetap belum dicatat senilai Rp 748,24 juta, belum dilakukan IP senilai Rp

636,4 miliar, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 83,8 miliar, dipergunakan oleh pihak lain senilai Rp 1,88 triliun, dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan senilai Rp 6,38 triliun."

Kemudian, terdapat permasalahan dalam penerimaan pajak, antara lain; surat tagih pajak (STP) belum diterbitkan sebesar Rp 448,84 miliar, pembayaran STP bunga penagihan melampaui tanggal jatuh tempo sebesar Rp 33,45 miliar, surat ketetapan pajak sebesar Rp 74,36 miliar diterbitkan setelah akhir tahun pajak daluarsa, Dirjen Pajak kurang menetapkan jumlah pajak terhutang sebesar Rp 338,02 miliar, dan penyelesaian keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 84,21 miliar.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih bermasalah, antara lain; PNBP terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp 206,51 miliar, PNBP tidak disetor ke kas

negara sebesar Rp 10,21 miliar. Setoran PNBP fiktif sebesar Rp 1,57 miliar, dan PNBP digunakan secara langsung di luar mekanisme sebesar Rp 166,4 miliar.

Tiga belas, BAKN menilai masih ada permasalahan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal K/L antara lain belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 209,17 miliar, kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp 82,98 miliar dan belanja modal sebesar Rp 250,7 miliar, Dend keterlambatan belanja barang sebesar Rp 7,99 miliar dan dend belanja modal sebesar Rp 35,7 miliar belum dipungut, belanja barang/modal fiktif sebesar Rp 58,6 miliar, dan penyimpangan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 12,31 miliar.

"Hasil laporan penelaahan ini secara resmi sudah disampaikan BAKN kepada pimpinan DPR dan Komisi-komisi terkait di DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," kata Sumarjati. ■ QAF